

PERUBAHAN SOSIAL KOMUNITAS PESISIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEGRADASI SUMBERDAYA ALAM DI KAWASAN DELTA MAHAKAM, KALIMANTAN TIMUR

Jimmy Cahyadi

*Staf Pengajar Jurusan Budidaya Perairan
FPIK Universitas Borneo Tarakan (UBT) Kampus Pantai Amal Gedung E,
Jl. Amal Lama No.1, Po. Box. 170 Tarakan KAL-TIM.
HP.081347288070. E-mail : jim.borneo@gmail.com*

ABSTRACT

This article studies about social change from in perpective of historical sosio of community who live in region Delta Mahakam Kalimantan Timur. Social change from coastal area community Delta Mahakam in the form of institution change influencing social system, has lessened local area carrying capacity is affecting high of resources degradation which is mangrove area is wide in world. This article substance, that change of community social Delta Mahakam started by some complex social processes like resident increase, contradiction (conflict and integration) between group and community communications process Delta Mahakam with other community having different in perpective background about Delta Mahakam. Social Management Approach Based On Trust Communication between the parties is having importance is alternative submitted in this article end.

Keywords : social change, degradation SDA, social management based on trust communication, sustainability

I. Pendahuluan

Sumberdaya alam pesisir dan laut dewasa ini semakin disadari banyak orang merupakan potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat pesisir, terutama nelayan. Konsekwensinya, sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya bersama (*common property*) dan terbuka untuk umum (*open access*) saat ini pemanfaatannya semakin meningkat di hampir semua wilayah. Pemanfaatan yang demikian cenderung melebihi daya dukung sumberdaya (*over exploitation*). Ghofar (2004) menyatakan bahwa perkembangan eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir saat ini (penangkapan, budidaya, tambang migas, ekstraksi bahan-bahan untuk keperluan medis) telah menjadi suatu bidang kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh pasar terutama yang bernilai ekonmis tinggi, sehingga mendorong eksploitasi sumberdaya laut dan pesisir dalam skala dan intensitas yang cukup besar.

Kajian mengenai perubahan sosial yang berimplikasi pada degradasi sumberdaya alam telah banyak dilakukan. Kajian-kajian ini pada umumnya melihat perubahan sosial dari perspektif sosio historis suatu masyarakat; dinamika internal dan

eksternal dalam bentuk kelembagaan, nilai-nilai dan norma selanjutnya mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap sumberdaya alam tempat masyarakat tersebut hidup. Perubahan sosial yang demikian telah terjadi dan dilakukan pada komunitas yang tinggal di wilayah pesisir Delta Mahakam Kalimantan Timur.

Sebagai suatu komunitas pesisir, proses historis yang terjadi oleh karena dorongan ekonomi untuk memanfaatkan sumberdaya alam setempat telah menyebabkan perubahan sosial komunitas tersebut. Perubahan sosial dari komunitas pesisir Delta Mahakam dalam bentuk perubahan kelembagaan yang mempengaruhi sistem sosial, telah mengurangi daya dukung lingkungan setempat (*carrying capacity*) yang berdampak semakin tingginya degradasi sumberdaya alam setempat yang merupakan kawasan mangrove terluas di dunia.

Substansi tulisan ini, bahwa perubahan sosial komunitas Delta Mahakam diawali oleh beberapa proses sosial yang kompleks seperti penambahan penduduk, pertentangan (konflik) diantara kelompok dan proses komunikasi komunitas Delta Mahakam dengan komunitas lain yang memiliki latar belakang perspektif berbeda tentang Delta Mahakam. Pada bagian akhir tulisan, penulis akan menyampaikan suatu wacana alternative penyelesaian masalah yang berbasis pada pentingnya komunikasi dan kesamaan perspektif terhadap makna pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini selanjutnya disebut sebagai Pengelolaan Sosial Berbasis Trust Communication.

II. Pembahasan

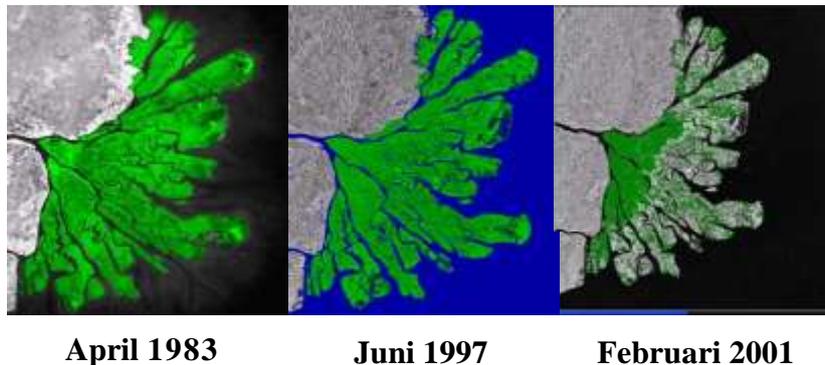
Delta Mahakam

Delta Mahakam terletak di kawasan pesisir provinsi Kalimantan Timur, berada pada posisi $117^{\circ}15'$ – $117^{\circ}45'$ BT serta $00^{\circ}15'$ – $01^{\circ}00'$ LS. Kawasan Delta Mahakam ini yang mempunyai luas ± 1500 km², hanya berjarak ± 25 km dari Samarinda, ibukota Propinsi Kalimantan Timur. Wilayah Delta Mahakam termasuk ke dalam administratif Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Sanga-sanga dan Kecamatan Anggana. Jumlah penduduk terus mengalami pertambahan, menurut data BPS Kutai Kartanegara jumlah penduduk dari 6600 jiwa (tahun 1997), bertambah menjadi 9.100 jiwa (tahun 1999) dan meningkat menjadi 10.500 jiwa (tahun 2001).

Bentangan daratnya merupakan daratan Delta yang khas, terdapat saluran dan sungai-sungai kecil yang terdistribusikan secara bertingkat. Delta yang berbentuk kipas ini, kebanyakan merupakan tanah endapan dengan tumbuh-tumbuhan endemik jenis bakau (*Avicennia*, *Rhizophora* dan *Nypahs*). Potensi produktifitas biologi yang sangat tinggi di kawasan Delta didukung oleh banyaknya bahan organik yang terbawa aliran sungai dan kemudian mengendap, menyebabkan kawasan ini mempunyai keanekaragaman hayati tinggi seperti jenis udang, kerang dan kepiting yang melimpah.

Dalam beberapa tahun terakhir ini terutama sejak krisis ekonomi tahun 1997, di Delta Mahakam telah terjadi pengembangan pertambakan udang yang sangat pesat yang dikembangkan di wilayah yang sebelumnya merupakan hutan bakau. Hasil dari penebangan hutan dan pertambakan ini telah mengakibatkan beberapa persoalan penting dan terus berkembang yakni masalah kehilangan tanah, penurunan produktifitas pertambakan, erosi pada bendungan tambak dan meningkatnya jenis penyakit udang.

Perubahan fisik (*land clearing*) tersebut, telah mengancam keseimbangan ekosistem wilayah hutan bakau dan kelangsungan sosial-ekonomi pertambakan udang itu sendiri (gambar 1).



April 1983 Juni 1997 Februari 2001
Gambar 1. Kronologis Proses *Land Clearing* di Delta Mahakam
(Prihartini, 2003 dalam Sutrisno, 2003)

Adanya kegiatan migas di kawasan Delta tersebut, menambah kompleksitas permasalahan sosial yang muncul seperti (a) persengketaan tanah terjadi dengan petambak ketika pipa-pipa baru dipasang, (b) tambak-tambak baru dibangun di atas lahan yang hak gunanya telah diperuntukkan untuk pemasangan minyak dan gas, (c) warga komunitas membuka tambak di sekitar atau di lahan yang dibawahnya merupakan jalur pipa dan tidak menyadari bahaya yang akan terjadi jika ada kerusakan akibat kebocoran atau kerusakan pada pipa-pipa tersebut, (d) timbulnya penyakit dan penurunan produktifitas udang, cenderung menyalahkan proses pencemaran dari eksploitasi minyak dan gas (CIRAD, 2002).

Terjadinya klaim dan konflik lahan tidak hanya antara masyarakat pesisir Delta Mahakam dengan perusahaan migas, namun juga antara warga setempat dengan pendatang. Izin penguasaan lahan yang didapat dari pemerintah setempat kepada para investor dari luar dan dalam wilayah Delta Mahakam juga memicu konflik yang berbasis tumpang tindih lahan.

Sejarah Pemukiman Komunitas di Delta Mahakam

Studi yang telah dilakukan CIRAD (2002) mencatat hingga permulaan abad ke-20, di wilayah Delta Mahakam merupakan hutan bakau tidak ada pemukiman manusia. Wilayah pemukiman manusia pada awalnya antara hutan bakau di daerah pesisir dengan pegunungan. Di daerah tersebut para perintis menanam padi, mengembangkan perkebunan kelapa semak, lada dan memelihara ikan. Pada wilayah hutan bakau, jauh dari daerah pegunungan, hanya terdapat pemukiman kecil dan tersebar dengan komposisi nelayan yang berasal dari Bajo dan Bugis yang beroperasi di sungai-sungai di dalam Delta Mahakam. Selain menangkap ikan, nelayan tersebut juga membuka perkebunan kelapa semak dan rotan.

Pola sistem perekonomian masih merupakan ekonomi subsisten. Hasil udang dan ikan selain ditukar (barter) secara terbatas dengan pakaian, beras, sebagian dikonsumsi sendiri. Para nelayan menangkap ikan dengan menggunakan perahu dayung dari kayu yang dibuat sendiri dengan alat tangkap manual seperti pancing dan jaring soro. Wilayah pertanian kelapa dan wilayah tangkap, tidak terbatas namun sepanjang kemampuan dari warga untuk memanfaatkannya.

Perjalanan sejarah perubahan perilaku masyarakat pesisir Delta Mahakam dimulai dari tahun 1900 hingga 2002 adalah sebagai berikut :

a) *1900 – 1942: Pemukiman Pertama*

Komunitas nelayan secara bertahap pindah lebih dekat ke laut. Pada masa tersebut produksi hanya ikan dan udang kering yang dijual masih terbatas ke kota Samarinda (Kalimantan Timur) melalui cara barter dengan beras, gula dan pakaian. Kegiatan penangkapan ikan dan udang dilakukan secara manual dengan menggunakan perahu dayung dari kayu yang dibuat sendiri oleh mereka sebagai milik modal menangkap ikan.

b) *1942 – 1949: Perang Merusak*

Hingga akhir masa perang, beberapa wilayah pemukiman Delta Mahakam seperti Muara Jawa, Muara Pantuan dan Muara Badag telah rata akibat perang. Warga komunitas setempat melarikan diri ke hutan atau ke kota Samarinda. Hingga tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan, populasi penduduk masing jarang di wilayah Delta Mahakam tersebut. Para nelayan menangkap ikan dan udang kecil untuk dijual secara terbatas ke kota Samarinda.

c) *1957 – 1973: Penyelundupan, Pemotongan Kayu dan Melaut*

Pada tahun-tahun pertama kemerdekaan, wilayah Delta Mahakam menjadi satu pusat alur kegiatan penyelundupan. Hingga tahun 1967, kegiatan menangkap ikan dan udang kecil sempat terhenti karena kebanyakan para pemilik perahu Bugis mengkhhususkan diri dalam menyelundupkan barang-barang ke dan dari Timur Malaysia. Dengan pembukaan Negara menuju pasar ekonomi dunia di bawah Pemerintahan Orde Baru, penyelundupan kehilangan peminat hingga tahun 1968. Para nelayan Delta Mahakam kembali melaut, sementara yang lainnya pergi ke daerah pegunungan Mahakam untuk memotong kayu di sepanjang pinggir sungai.

d) *Awal Tahun 1970-an: Titik Tolak*

Hingga awal tahun 1970-an, populasi penduduk Delta Mahakam masih jarang. Semua berubah dengan dimulainya eksploitasi dan produksi minyak. Penduduk setempat ditawarkan kesempatan kerja baru sebagai pekerja harian, pengawas, pengemudi speedboat, petugas keamanan dan lain-lain. Seiring dengan kesempatan kerja kerja menjadi penting dan tidak dapat dipenuhi oleh penduduk setempat, mulailah terjadi terjadi gelombang migrasi dari Sulawesi pada tahun 1970-an. Masuknya para pekerja dalam jumlah besar menciptakan pasar baru untuk produksi produk lokal terutama untuk ikan dan seafood (masakan laut).

Peristiwa penting lainnya pada kurun waktu ini adalah pembukaan fasilitas kamar pendingin untuk pengawetan udang yang pertama di Kalimantan Timur pada tahun 1974. Dengan penyediaan akses pasar internasional bagi produksi lokal terutama udang, menawarkan harga yang lebih baik dan tempat penjualan yang aman bagi nelayan setempat melalui peminjaman modal bagi nelayan tertentu agar memperbaharui armada serta perlengkapan mereka. Fasilitas kamar pendingin yang didirikan oleh perusahaan pengolah hasil perikanan (*cold storage*) berdampak besar bagi ekonomi setempat.

e) *1977: Kebangkitan Punggawa*

Perusahaan-perusahaan lemari pendingin telah membantu menciptakan kelas pengusaha kaya yaitu para punggawa, dengan cara mendapatkan modal untuk para penyalur udang yang paling terpercaya di wilayahnya. Suplai udang khususnya udang windu (*tiger prawn*) semakin tidak sanggup mengimbangi permintaan internasional yang tinggi, para perusahaan lemari pendingin mendorong dan menolong punggawa untuk meningkatkan usaha mereka. Sekitar tahun 1975-an pengenalan alat tangkap pukot harimau (*trawl*) sangat meningkatkan hasil tangkapan udang, paling tidak dalam waktu yang singkat, Keputusan pelarangan menggunakan pukot harimau oleh pemerintah pada tahun 1980-an dirasakan sebagai pukulan keras bagi produsen lokal.

f) *1980 – 1990: Tahun-tahun Kebangkitan Tambak*

Berakhirnya masa penggunaan alat tangkap pukot harimau berdampak pada pemenuhan kebutuhan udang windu, pengganti haruslah ditemukan untuk memenuhi permintaan udang pasar internasional yang selalu meningkat. Metode budidaya udang dalam tambak telah sukses di Negara Taiwan dan Thailand; dan segera diperkenalkan di Delta Mahakam melalui program kemitraan dan kerjasama baik oleh sektor swasta (perusahaan pengolah hasil perikanan, LSM) maupun pemerintah (Dinas Perikanan Kalimantan Timur). Beberapa imigran Bugis telah telah menguasai teknik-teknik budidaya tambak cara tradisional untuk menghasilkan ikan bandeng (*Chanos chanos*) sejak asal mereka di Sulawesi Selatan dan mulai melakukan inovasi kegiatan pertambakan di Delta Mahakam sejak tahun 1977-1975.

Percobaan mereka untuk memperkenalkan budidaya udang dalam tambak terhambat oleh kekurangan benih. Lebih banyak percobaan dilaksanakan pada awal tahun 1980-an. Kesuksesan dari pemeliharaan udang dalam tambak, diadopsi oleh banyak pengikut. Punggawa termasuk yang pertama tergabung dalam pergerakan dengan bantuan keuangan perusahaan-perusahaan pengolahan hasil perikanan (*cold storage*).

Keberhasilan ini menjadikan para punggawa menjadi sangat kaya sehingga semakin menarik banyak pengikut dan memprakarsai sebuah gelombang imigrasi baru dari Sulawesi. Hingga akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, kawasan Delta Mahakam mengalami peningkatan konversi lahan budidaya (perluasan penggarapan tanah menjadi tambak) yang sangat tinggi.

g) *1990 – 2002: Lonjakan*

Pada tahun 1990, alat-alat berat mesin traktor penggali mulai menggantikan pekerja manual dalam pembukaan lahan tambak baru. Momentum penggunaan mesin penggali ini, telah mendorong pembukaan lahan tambak baru secara besar-besaran. Lahan yang pada awalnya merupakan kebun kelapa, dengan mesin menggali dengan segera diubah (*konversi*) menjadi lahan tambak baru, demikian pula dengan hutan bakau dan nipah, dalam sekejap telah berubah menjadi kawasan tambak, sehingga perkembangan luasan tambak yang semulanya hanya 14% dari luas total Delta Mahakam pada tahun 1999, melonjak mencapai 75% pada tahun 2001.

¹ *Punggawa* adalah seseorang yang memodali kegiatan perikanan (ikan dan udang) dengan cara meminjamkan kerja kepada nelayan tangkap atau petambak. Pembayaran pinjaman melalui angsuran penjualan ikan udang hasil tangkapan / tambak kepada punggawa yang meminjamkan modal kerja tersebut.

Delta Mahakam Dalam Konteks Perubahan Sosial

Peningkatan populasi penduduk dan tekanan motivasi ekonomi telah mendorong perubahan sosial komunitas di Delta Mahakam. Dalam pengertiannya, perubahan sosial diartikan sebagai suatu gejala perubahan-perubahan pada lembaga di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Sumardjo, 2004). Dalam konteks tersebut, perubahan sosial yang terjadi pada komunitas Delta Mahakam teridentifikasi sebagai berikut:

a) Dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar

Perekonomian subsistem komunitas Delta Mahakam, ditandai dengan kegiatan penangkapan ikan dan udang kecil yang dilakukan sejak awal terjadinya imigrasi manusia ke kawasan Delta Mahakam mulai sekitar tahun 1900-an hingga masa-masa awal kemerdekaan (1947 – 1957). Pada masa tersebut, kegiatan penangkapan ikan dan udang oleh warga Delta Mahakam lebih pada motivasi pemenuhan kebutuhan sendiri. Ikan dan udang hasil tangkapan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan, bila terdapat kelebihan hasil tangkapan baru kemudian mereka tukarkan dengan barang-barang komoditi yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri seperti beras, pakaian dan lain-lain.

Tekanan dalam bentuk permintaan pasar ekspor udang, telah mendorong dibukanya perusahaan pengolahan hasil perikanan (cold storage) berteknologi pendingin. Dengan adanya teknologi lemari pendingin, udang yang dihasilkan dapat lebih lama disimpan untuk kemudian diekspor. Permintaan pasar ekspor udang dari internasional, telah membuat perubahan dalam sistem jaringan pemasaran udang. Kegiatan produksi udang yang sedianya hanya diperuntukkan bagi kebutuhan subsisten dengan alat tangkap sederhana, kini produksi udang harus dilacu semaksimal mungkin. Peralatan tangkap yang digunakan menjadi serba mekanik (mesin kapal dan alat tangkap pukat harimau), sementara itu kegiatan produksi udang tidak hanya dilakukan melalui penangkapan. Pembukaan lahan tambak secara besar-besaran untuk memelihara udang yang merambah kawasan hutan bakau dan nypah dengan menggunakan alat berat mesin penggali, dilakukan demi memenuhi kebutuhan pasar ekspor udang ke mancanegara.

b) Kelembagaan sosial dalam permodalan usaha perikanan

Perubahan dari sistem ekonomi subsisten menjadi ekonomi pasar dalam sistem perdagangan udang di Delta Mahakam ternyata berimplikasi pula dengan perubahan dalam kelembagaan permodalan usaha perikanan. Sistem ekonomi subsisten yang berlaku pada tahun 1960-an, dicirikan dengan penggunaan modal usaha milik sendiri dan hasil yang didapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Tekanan sistem ekonomi pasar, telah mendorong para nelayan penangkap udang untuk meminjam modal usaha (dalam bentuk perahu dan alat tangkap) kepada punggawa. Pengembalian peminjaman modal usaha kemudian diperhitungkan dengan cara kewajiban nelayan untuk menjual udang hasil tangkapan kepada punggawa berangkutan. Pola seperti ini juga terjadi pada petambak yang meminjam uang dari punggawa untuk membiayai pembukaan tambaknya. Hubungan patron-klien antara punggawa dengan anak buahnya, menyebabkan ikatan anak buah terhadap para punggawanya semakin erat, bahkan berlangsung seumur hidup.

c) *Dari private common property to private property*

Tekanan ekonomi pasar dalam penyediaan udang, telah mengharuskan tersedianya lahan tambak untuk produksi udang. Permintaan perluasan lahan tambak secara ekstensifikasi telah menyebabkan semakin tingginya nilai nominal lahan yang telah menjadi tambak maupun masih dalam bentuk hutan bakau dan nypah. Peningkatan nilai nominal lahan tersebut menyebabkan adanya usaha warga dan para pemodal dari luar Delta Mahakam untuk mempunyai hak penguasaan secara pribadi.

Pada masa sebelum maraknya pembukaan tambak pada tahun 1970-an, masyarakat pesisir Delta Mahakam dapat memanfaatkan sumberdaya alam setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Daun nypah yang biasa digunakan untuk dijadikan atap rumah dapat diambil secara bebas di kawasan hutan nypah yang secara hukum masuk sebagai hutan milik Negara tersebut. Kegiatan menangkap udang dan ikan, dapat dilakukan di sepanjang sungai Delta Mahakam tanpa harus meminta izin kepada orang lain.

Sejak marak kegiatan pembukaan tambak untuk memenuhi pasokan ekspor udang mulai tahun 1990-an, para punggawa dan investor berlomba-lomba untuk mendapatkan izin hak garap ke desa dalam rangka konversi lahan menjadi lahan tambak produktif. Perubahan status hak garap dari “milik Negara” ke “milik pribadi”, menyebabkan perubahan dalam tata nilai penggunaan kawasan publik. Semakin banyak lahan-lahan yang telah dikuasai secara privat oleh para pemodal untuk usaha tambak, semakin sulit warga komunitas Delta Mahakam memanfaatkan ruang-ruang dan mengakses sumberdaya ekonomi yang pada awalnya bersifat common property menjadi private property.

d) *Pola hubungan sosial komunitas*

Akses pasar produksi udang di kawasan Delta Mahakam, telah memberikan akses bagi warga komunitas Delta Mahakam terhadap sarana-sarana sosial dari luar. Interaksi antara warga komunitas desa yang lebih dahulu tinggal di kawasan Delta Mahakam dengan komunitas pendatang yang bekerja di perusahaan migas, telah menimbulkan adopsi terhadap berbagai sarana fisik dalam pola hubungan sosial komunitas. Dimulai dengan digunakannya alat komunikasi antar rumah menggunakan kabel yang juga menghubungkan rumah-rumah pekerja kontraktor perusahaan migas, hingga penggunaan telepon genggam yang sistem jaringannya difasilitasi oleh perusahaan migas yang beroperasi di daerah mereka.

Pola-pola hubungan sosial dalam lingkungan pertetangga warga komunitas desa-desa di Delta Mahakam, menjadi semakin terbuka dan bersifat permisif. Komunikasi dengan menggunakan telepon genggam baik berbicara maupun melalui fasilitas short message service (SMS) dengan orang lain menjadi semakin privat untuk tidak diketahui oleh orang lain, orang tua sekalipun.

Analisa Perubahan Sosial Delta Mahakam

Studi-studi mengenai perubahan sosial dari perspektif sosio-historis yang berimplikasi terhadap perubahan kondisi lingkungan alam telah banyak dilakukan oleh para ahli. Cronon (1983) dalam studinya berjudul “Changes in The Land: Indians, Colonialist and The Ecology New England”, membahas tentang proses perubahan dari suatu kondisi environmental equilibrium di New England dengan cara melihat degradasi lingkungan alam yang signifikan di New England oleh sebab pola perilaku manusia sejak tahun 1600-an hingga 1800-an. Cronon melukiskan sejak beberapa generasi lalu

tahun di-1600-an, komunitas Indian di New Zealand bertumpu pada pola mata pencaharian berburu, menangkap ikan, membuka hutan untuk kegiatan pertanian guna mencukupi kebutuhan pangan mereka. Walaupun kegiatan pemanfaatan lingkungan alam tersebut terus mereka dilakukan, dengan cara hidup demikian dalam jangka panjang lingkungan alam masih dapat mentolelir perubahan yang terjadi. Kondisi ini oleh Cronon disebut *environmental equilibrium*.

Pada sekitar tahun 1800-an proses transisi terjadi dengan kedatangan para kolonialis ke wilayah mereka sekaligus membawa cara hidup baru yang berdampak adanya transformasi dan perubahan ekologi. Kegiatan pertanian, perlakuan terhadap binatang dan penguasaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh dua komunitas Indian dan pendatang kolonialis ini dideskripsikan oleh Cronon melalui perspektif *histories* sehingga menunjukkan perbedaan dan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan alam setempat. Berbeda dengan komunitas Indian dalam memanfaatkan sumberdaya alam, para pendatang kolonialis bersifat kapitalis dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang berbasis orientasi pasar dan perdagangan internasional. Kondisi ini sangat mempengaruhi perubahan ekologi seperti perubahan kondisi habitat binatang, vegetasi alam, bahkan perubahan alur sungai dan bentang alam. Di sisi lain pola perlakuan komunitas Indian setempat dalam mengeksploitasi sumberdaya alam menunjukkan pola hubungan yang kesetimbangan dengan tetap menjaga daya dukung alam sebagai sumber penghidupan mereka.

Studi lain juga dilakukan Semedi, dalam studinya yang diberi judul *Close to the Stone, Far from the Throne: The Story of Javanese Fishing Community 1920 – 1990* (2003), ia menyoroti juga melalui perspektif *histories* tentang komunitas nelayan di pantai Utara Jawa dan hubungannya dengan kegiatan eksploitasi sumberdaya laut sebagai sumber ekonomi. Untuk membuat eksplanasi tentang studinya, Semedi membagi kurun waktu antara tahun 1820 – 1990 menurut konteks peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi dinamika kehidupan komunitas desa pesisir Wonokerto Kulon khususnya (sebagai studi kasus) dan pantai Utara Jawa umumnya.

Dalam studinya itu Semedi telah menunjukkan jenis seperti apa komunitas desa pesisir pantai Utara Jawa yang bekerja di tengah laut sebagai nelayan. Menurutnya, komunitas nelayan pantai Utara Jawa jauh dari pusat kekuasaan Jawa yang berbasis ekonomi pertanian, secara mental lebih bersifat independen dan agresif. Walaupun mereka bersifat independen dan agresif, mereka mempercayai religi Islam yang juga berfungsi sebagai pelindung

Persoalan hubungan pola perilaku manusia dan daya dukung sumberdaya laut dalam menyediakan pangan, Semedi menyoroti masalah *over-fishing* di Indonesia. Melalui perspektif *histories*nya, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi secara global tidak hanya pada nelayan di pantai Utara Jawa yang mengalami peningkatan modal produksi, tetapi juga mencakup sektor perikanan dengan jarak yang lebih jauh untuk mencari ikan. Kegiatan mencari ikan tidak lagi berada dalam hitungan perjalanan pergi pulang dalam satu hari dan dekat dengan wilayah pantai mereka seperti dialami pada abad ke-19. Nelayan pantai Utara Jawa juga harus mencari wilayah tangkap baru, kapal yang lebih besar dengan waktu jelajah beberapa hari hingga satu bulan, peralatan di kapal yang lebih modern, walaupun Semedi masih menyatakan “terlalu pagi untuk menyatakan bahwa potensi laut perairan Jawa sudah habis” tetapi pola perikanan yang lebih *sustainable* harus diaplikasikan sehingga memberikan kesempatan bagi generasi masyarakat Indonesia selanjutnya.

Studi lain tentang pemanfaatan dan perubahan kondisi lingkungan alam (hutan alam) di Kalimantan didokumentasikan oleh Padoch dan Peluso (1996) dalam satu kumpulan tulisan yang menyoroti perubahan-perubahan ekologi di pulau Kalimantan oleh sebab pola perilaku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara berlebihan sejak tiga dekade yang lalu. Perubahan-perubahan signifikan yang terjadi seperti dibidang perkebunan yang mengintroduksir spesies eksotis dalam bentuk monospesific plantation of rubber (*Hevea brasiliensis*), African oil palm (*Elaeis guineensis*) dan tanaman untuk keperluan bubur kayu (pupl) seperti *Gmelina spp*; *Albizia spp* yang menggantikan hutan alam di banyak lokasi pulau Kalimantan. Ratusan ribu imigran yang disponsori oleh pemerintah maupun spontan telah membawa secara permanen berbagai cara baru dalam mengelola tanaman, air dan tanah.

Munculnya hubungan perdagangan jarak jauh melalui laut antara pulau Kalimantan dengan Afrika, Cina dan India, telah mendorong eksploitasi hewan dan masuknya manusia jauh ke dalam hutan. Perdagangan lintas negara juga mendorong eksploitasi sumberdaya alam pulau Kalimantan tidak hanya pada sumberdaya hayati, namun non hayati seperti bahan-bahan mineral, minyak dan gas bumi.

Studi Peluso (1983) berjudul *Networking in the Commons: A Tragedy for Rattans*, merupakan studi kasus yang mengulas mengenai eksploitasi sumberdaya hasil hutan alam non kayu rotan yang berdampak terhadap “ledakan penduduk” yang terlibat dalam jaringan perdagangan rotan di sepanjang sungai desa-desa di sepanjang hulu sungai Mahakam, Kalimantan Timur yang berpotensi menimbulkan “the tragedy of the commons”.²

Deskripsi Peluso dalam studinya, diawali dengan penjelasan mengenai proses evolusi kegiatan pengumpulan hasil hutan non kayu rotan dalam tingkat lokal dan munculnya sistem perdagangan komoditi tersebut di tingkat internasional. Melalui penjelasan kronologis sejak pertengahan abad ke-19, rotan sudah merupakan komoditi yang penting melalui pertukaran dalam bentuk reciprocity³ antara komunitas etnik Dayak di pedalaman dengan komunitas etnik Bugis yang tinggal di bagian muara sungai Mahakam. Penduduk pedalaman menukarkan barang-barang hasil hutan yang mereka kumpulkan dari pedalaman sepanjang sungai Mahakam seperti rotan dengan barang-barang lain seperti garam, pakaian dan tembakau. Kegiatan pertukaran ini menjadi salah satu pendapatan pajak bagi Kesultanan Kutai dimasa itu. Perkembangan perdagangan rotan menjadi semakin meluas ketika pada tahun 1959 orang-orang Cina mengembangkan jaringan perdagangan dengan orang-orang Indonesia ke daerah pedalaman sepanjang sungai Mahakam, meski secara terbatas karena pembatasan gerak yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap mereka.

² Konsep “*tragedy of the commons*” pada awalnya dikemukakan oleh Garrett Hardin (Mc Cay et al 1987). Konsep ini muncul berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan akibat industrialisasi di negara maju, namun menggunakan bahan baku yang berasal dari negara-negara dunia ketiga. Dampak akibat kegiatan industri di negara maju ini tidak hanya degradasi yang tinggi terhadap sumberdaya alam negara-negara dunia ketiga namun juga menimbulkan dampak lingkungan lainnya seperti *acid rain*, polusi laut, erosi tanah, penurunan jumlah populasi ikan serta berbagai limbah beracun telah dirasakan oleh penduduk negara-negara dunia ketiga dalam bentuk penurunan kondisi kesehatan dan mutu kehidupan. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari proses industrialisasi ini berimbas pada kehidupan bersama umat manusia di muka bumi, muncullah konsep “*tragedy of the commons*”.

³ *Reciprocity* dalam konsep antropologi ekonomi merupakan hubungan timbal balik antara perseorangan maupun kelompok sosial yang berbeda. Hubungan timbal balik ini berwujud dalam bentuk hubungan pertukaran yang berfungsi ganda yakni sebagai satu kesatuan (unity) kelompok yang melakukan pertukaran dan sebagai hubungan timbal balik antara dua pihak yang melakukan pertukaran. Bentuk pertukaran lainnya dijabarkan oleh Polanyi (1968) dalam bentuk *Redistribusi* dan *Market Exchange*.

Motorisasi alat angkut sungai Mahakam yang mulai menggantikan perahu dayung pada tahun 1960-an, telah mengurangi jumlah tenaga kerja angkutan perahu dayung. Transportasi akibat mekanisasi alat angkut sungai, telah mempercepat waktu tempuh dari pedalaman ke luar atau sebaliknya. Permintaan barang konsumsi dari luar semakin tinggi seperti gula pasir, rokok, pakaian, radio, sepeda motor dan chainsaws, seiring dengan penyediaan komoditi hasil hutan dari daerah pedalaman seperti kulit buaya dan kayu gelondongan. Pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) oleh pemerintah secara besar-besaran pada tahun 1970-an, telah mendorong terbukanya aksesstabilitas ke daerah pedalaman melalui jalan logging, kapal motor yang berfungsi mengeluarkan kayu dari hutan.

Bersamaan dengan kondisi tersebut, akhir tahun 1970-an, pasar internasional terutama Philipina, Jepang membutuhkan komoditi rotan secara besar-besaran akibat kebijakan mereka yang melindungi produk hutan mereka sendiri. Jaringan pasar perdagangan rotan dan hasil hutan lainnya pun terbentuk melalui kelompok-kelompok peer group yang bersifat informal di desa-desa pedalaman. Jaringan pasar informal ini bertingkat mulai dari kelompok penduduk desa pengumpul hasil hutan, kelompok pembeli pengumpul yang berada di desa, kelompok pembeli yang berada dalam tingkat beberapa desa hingga pada kelompok pembeli partai besar di perkotaan. Diantara tingkatan penjual dan pembeli dalam jaringan perdagangan ini terdapat regulasi yang mengatur skema-skema pemberian pinjaman kredit secara informal. Persaingan diantara para pedagang besar terjadi ketika mereka berusaha menjamin pasokan hasil hutan guna memenuhi permintaan pasar mereka.

Regulasi di bidang perdagangan hasil hutan rotan tahun 1980-an, bertujuan mereduksi monopoli yang terjadi diantara para pedagang besar dalam jaringan perdagangan hasil hutan rotan. Kebijakan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dan pendirian institusi koperasi unit desa dalam tingkat desa secara formal, ternyata tidak memberikan perbaikan ekonomi secara signifikan bagi warga desa. Ikatan antara penduduk desa yang berkerja sebagai pengumpul hasil hutan dengan para pembeli pengumpul merupakan suatu hubungan yang bersifat patron-klien. Melalui ikatan informal, para pembeli pengumpul tidak hanya membeli hasil hutan yang warga desa, mereka juga memberikan “bantuan” lain seperti biaya kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, penyediaan kesempatan kerja ketika kegiatan perdagangan berlangsung. Hubungan patron-klien dalam perdagangan hasil rotan seperti ini juga menjaga para pekerja pengumpul hasil hutan untuk resiko kerugian akibat bencana alam dan menjaga dari kerugian akibat fluktuasi pasar tidak terkendali.

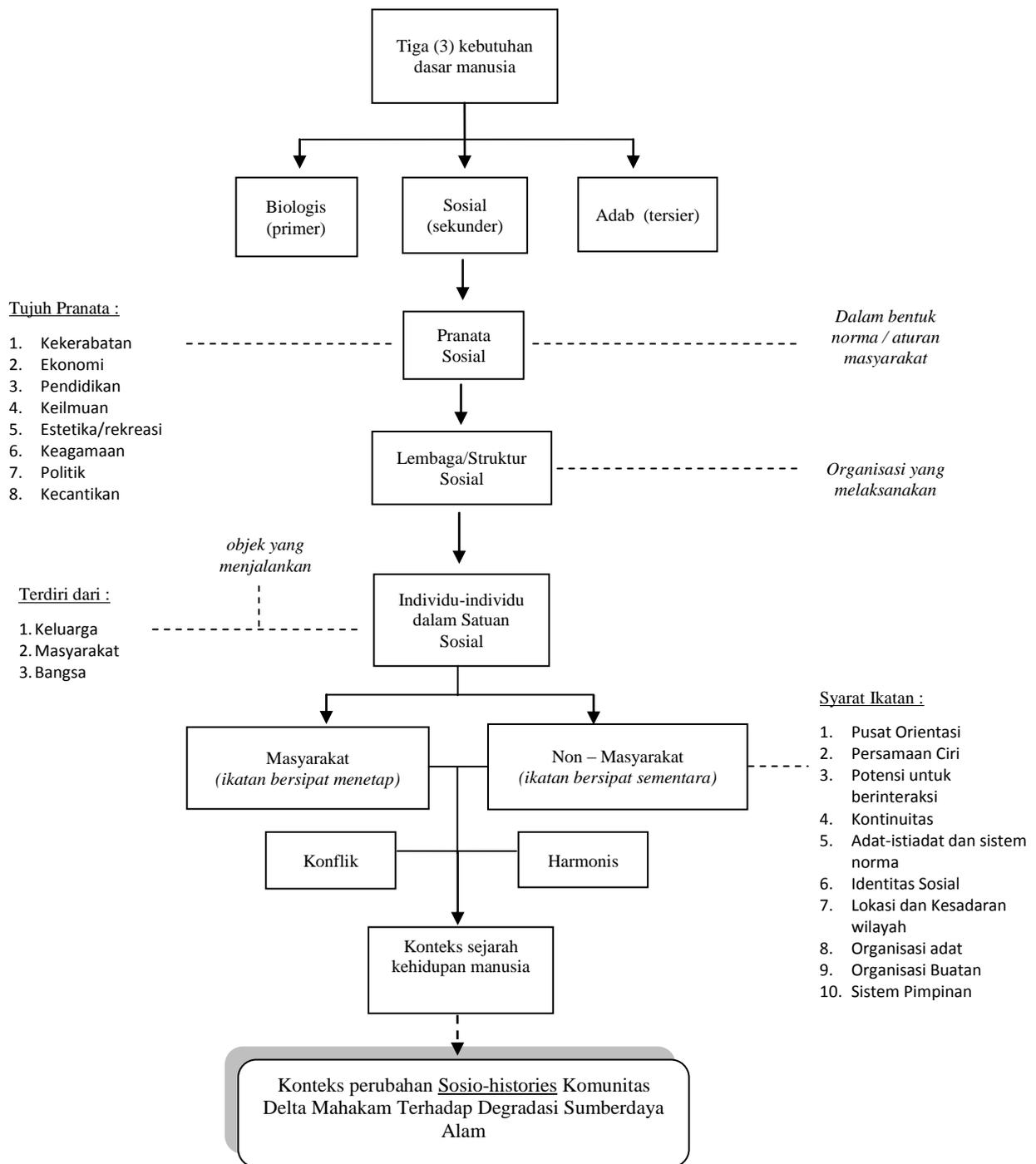
Hal ini tidal terlepas dari kerangka orientasi nilai-nilai kebudayaan yang terjadi terus menerus dalam kehidupan masyarakat Delta Mahakam dimana sistem nilai budaya secara universal berorientasi kepada lima masalah dasar dalam kehidupan. Kelima masalah dasar itu menyangkut masalah: hakikat hidup, hakikat karya, persepsi masyarakat tentang waktu, pandangan terhadap alam dan hakikat hubungan antar manusia. Berlakunya kelima orientasi nilai tersebut, dicontohkan oleh Koentjaraningrat (1984) *dalam* Thohir (2007) yang telah dimodifikasi untuk mewakili gambaran komunitas Delta Mahakam sebagai berikut :

Masalah Hidup	Orientasi Nilai Budaya		
	Komunitas A <i>penduduk pesisir kuno</i>	Komunitas B <i>penduduk pesisir modern</i>	Komunitas C <i>industri</i>
Hakikat dan sifat hidup	Hidup adalah buruk	Hidup adalah baik	Hidup adalah buruk tetapi harus diperbaiki
Hakikat kerja (karya)	Kerja untuk hidup	Kerja untuk mencari kedudukan	Kerja untuk menambah mutu karya
Hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu	Masa lalu	Masa kini	Masa depan
Hakikat hubungan manusia dengan alam	Tunduk kepada alam	Mencari keselarasan hidup dengan alam	Menguasai alam
Hakikat hubungan manusia dengan manusia	Memandang kepada tokoh-tokoh atasan	Mementingkan rasa ketergantungan kepada sesamanya (berjiwa gotong royong)	Mementingkan rasa tidak tergantung kepada sesamanya (berjiwa individualistik)

Gambar 2. Wujud kerangka orientasi nilai budaya komunitas Delta Mahakam

Kerangka orientasi nilai kebudayaan yang terjadi pada komunitas Delta Mahakam dimulai dari kebudayaan pesisir kuno (komunitas A) lalu kebudayaan pesisir modern (komunitas B) dan mulailah era industrilisasi (komunitas C) merambah dan tumbuh subur dengan konsep dasar mereka *dari private common property to private property*. Dimulai pada era tahun 1942-1949 perang yang merusak, era tahun 1957-1973 setelah merdeka terjadi penyelundupan, pemotongan kayu dan aktifitas melaut lalu pembukaan tambak untuk memenuhi pasokan ekspor udang mulai tahun 1990-an, para punggawa dan investor berlomba-lomba untuk mendapatkan izin hak garap ke desa dalam rangka konversi lahan menjadi lahan tambak produktif. Perubahan status hak garap dari “milik Negara” ke “milik pribadi”, menyebabkan perubahan dalam tata nilai penggunaan kawasan publik. Semakin banyak lahan-lahan yang telah dikuasai secara privat oleh para pemodal untuk usaha tambak, semakin sulit warga komunitas Delta Mahakam memanfaatkan ruang-ruang dan mengakses sumberdaya ekonomi yang ada.

Menurut Koentjaraningrat (1984) dalam Thohir (2007) yang telah dimodifikasi untuk menggambarkan komunitas Delta Mahakam, diuraikan bahwa konteks sejarah kehidupan manusia dimulai dari tiga kebutuhan dasar hidup yaitu: biologis (primer), Sosial (sekunder) dan Adab (tersier), pola hubungan konteks sejarah kehidupan manusia tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. Proses Struktural Fungsional Kehidupan Manusia (Koentjaraningrat, 1984 dalam Thohir, 2007 yang dimodifikasi)

Dilihat dari perspektif antropologis, masyarakat di daerah pesisir (nelayan) berbeda dari masyarakat petani, perkotaan atau masyarakat didataran tinggi. Perspektif antropologis ini didasarkan pada realitas sosial bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Pola-pola

kebudayaan menjadi kerangka berpikir atau referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Tohir, 2002).

Jabaran mengenai studi-studi yang telah dilakukan oleh para ahli sebelumnya, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara manusia sebagai suatu faktor sosial dengan lingkungan alam dengan keterbatasan daya dukung yang dimilikinya. Apabila dilakukan perbandingan diantara studi-studi tersebut, terdapat 4 (empat) faktor sosial penting yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong ke arah perubahan sosial sehingga mempengaruhi daya dukung alam (*carrying capacity*)⁴ dalam interaksinya dengan manusia :

- 1) berupa tekanan penduduk (demografi) yang terlalu cepat dengan permintaan ketersediaan pangan yang tinggi pula;
- 2) interaksi suatu komunitas atau masyarakat dengan komunitas atau masyarakat yang berbeda kebudayaan;
- 3) pengorganisasian terhadap ketersediaan sumberdaya alam setempat baik yang bersifat lokal informal maupun yang dihasilkan oleh pemerintah;
- 4) kepentingan dari masing-masing pihak yang menghasilkan pilihan tindakan-tindakan rasional menurut perspektif kepentingannya dengan menggunakan strategi tertentu dan jaringan sosial yang menghimpun kekuatan sosial dari para anggota yang memiliki kepentingan sama sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menuju Perubahan Sosial Komunitas Delta Mahakam Berbasis Trust Communication

“Communication as the process by which participants create and share information with one another to reach a mutual understanding” (Roger, 1983: 17). Konsep tersebut merupakan suatu hal yang sederhana untuk menggambarkan hubungan antar dua belah pihak atau lebih sehingga terjadi saling kesepahaman.

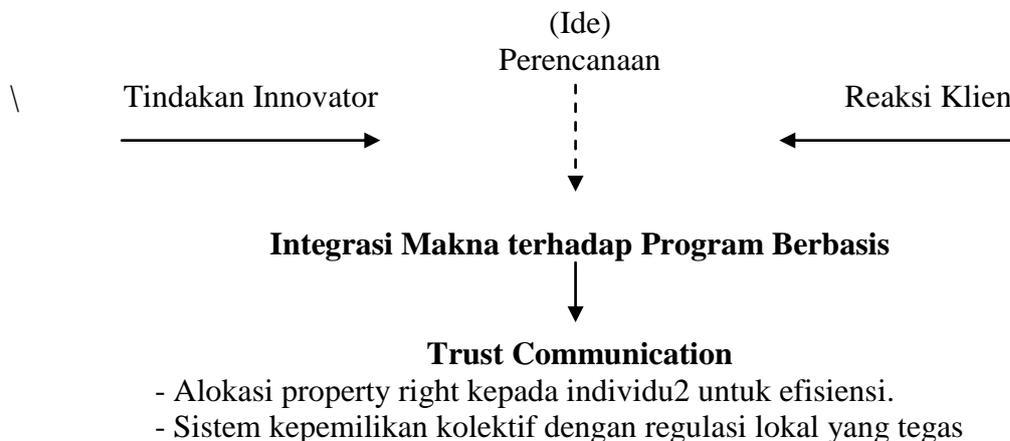
Sebagai suatu proses, komunikasi tidak selalu dapat berjalan dengan mudah, manakala kedua pihak atau lebih tidak mempunyai kesamaan makna terhadap suatu hal yang dipersepsikan. Perbedaan penafsiran terhadap suatu makna tertentu dalam komunikasi antar pihak, dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam berakibat degradasi terhadap kondisi sumberdaya alam tersebut. Degradasi sumberdaya alam berupa hutan mangrove yang terdapat di Delta Mahakam Kalimantan Timur, merupakan suatu studi kasus terjadinya perbedaan penafsiran “makna” pemanfaatan sumberdaya alam oleh berbagai pihak yang memiliki latar belakang kepentingan.

Dalam konteks kasus perubahan sosial di Delta Mahakam yang berimplikasi terhadap degradasi sumberdaya alam hutan mangrove, pengelolaan sosial harus berbasis pada upaya mengurangi tekanan terhadap eksploitasi berlebihan kawasan mangrove dengan berprinsip bahwa pembatasan akses para punggawa sebagai investor dan petambak untuk mengurangi eksploitasi berlebihan dengan tetap menjamin bahwa upaya tersebut tidak berdampak pada warga komunitas lokal yang selama ini bergantung pada jaringan perdagangan tersebut.

Dalam upaya mewujudkan prinsip pengelolaan sosial tersebut, seorang penyuluh pembangunan merupakan suatu innovator bagi klien (komunitas Delta Mahakam). Merancang dan mengkomunikasikan program pengelolaan sosial dari innovator kepada

⁴ Konsep *Carrying Capacity* dikenal dalam kajian ekologi manusia dan cultural ecology sebagai suatu kemampuan dukungan alam terhadap pemanfaatan sumberdayanya dalam bentuk kesuburan tanah dan produksi makanan bagi populasi yang menempati area tertentu. (Ellen, 1982: 41).

klien harus dilakukan melalui suatu proses penyamaan interpretasi tentang suatu ide program seperti bagan berikut :



Gambar 4. Interpretasi program berbasis trust communication

Ide program yang dapat diusulkan dalam kasus pengelolaan sosial berbasis trust communication antara lain :

- 1) Melakukan alokasi terhadap hak penguasaan pribadi (*private property rights*) kepada individu-individu tertentu untuk mengelola secara lebih efisien dan menguntungkan sumberdaya alam yang ada. Langkah demikian tidak hanya dapat mencegah masuknya lebih banyak lagi orang yang ingin menggantungkan harapan dalam bisnis perikanan tambak, penguatan bagi keberadaan struktur komunitas lokal serta mendorong upaya peningkatan keuntungan bagi “penguasa hak pribadi” (*the owner of private property rights*) dan reinvestasi dari keuntungan ke lahan yang dikuasainya.
- 2) Membangun sistem kepemilikan secara kolektif yang keuntungannya didistribusikan kembali kepada kelompok tersebut untuk reinvestasi. Agar efektif, sistem tersebut harus berbasis pada struktur sosial ekonomi lokal, tidak dibangun melalui “kacamata” ahli dari luar. Konsistensi berjalannya sistem tersebut, diperlukan adanya suatu penerapan regulasi yang berfungsi memberikan insentif bagi para pelaku. Regulasi ini dapat berupa kombinasi antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dan yang dilahirkan oleh institusi lokal dalam sistem pengelolaan sumberdaya lokal.

III. Penutup

Degradasi sumberdaya alam di kawasan Delta Mahakam tidak terlepas dari hubungan yang signifikan antara manusia sebagai suatu faktor sosial dengan lingkungan alam dengan keterbatasan daya dukung yang dimilikinya. Terdapat 4 (empat) faktor sosial penting yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong ke arah perubahan sosial sehingga mempengaruhi daya dukung alam (*carrying capacity*) dalam interaksinya dengan manusia :

1. berupa tekanan penduduk (demografi) yang terlalu cepat dengan permintaan ketersediaan pangan yang tinggi pula;

2. interaksi suatu komunitas atau masyarakat dengan komunitas atau masyarakat yang berbeda kebudayaan;
3. pengorganisasian terhadap ketersediaan sumberdaya alam setempat baik yang bersifat lokal informal maupun yang dihasilkan oleh pemerintah;
4. kepentingan dari masing-masing pihak yang menghasilkan pilihan tindakan-tindakan rasional menurut perspektif kepentingannya dengan menggunakan strategi tertentu dan jaringan sosial yang menghimpun kekuatan sosial dari para anggota yang memiliki kepentingan sama sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kompleksitas persoalan pengelolaan sumberdaya alam pada kawasan Delta Mahakam di Kalimantan Timur pada dasarnya dapat diperbaiki. Basis menuju pengelolaan berkelanjutan wilayah ini adalah adanya kesamaan interpretasi antar pihak bahwa pengelolaan kawasan tersebut jangan sampai melampau daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Pendekatan program berbasis Trust Communication diantara para pelaku menjadi salah satu alternative penyelesaian masalah tersebut.

Daftar Pustaka

- Anggoro, S. 2004. "Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah". Magister Manajemen Sumberdaya Pantai. Semarang: Universitas Diponegoro.
- BPS. 2002. Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka. Tenggarong. Kalimantan Timur.
- CIRAD. 2002. Analisis Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pihak-pihak Terkait di Delta Mahakam (Laporan Penelitian tidak diterbitkan).
- Peluso, N.L. 1990. Networking in the Commons: A Tragedy for Rattan Indonesia, Indonesia No.25.
- Peluso, *et al.*, 1996. Borneo People and Forest in Transition: An Introduction dalam Borneo in Transition; People, Forest, Conservation and Development. Oxford: Oxford University Press.
- Semedi, Pujo., 2003. Close to the Stone: Far from the Throne: the story of a Javanese fishing community 1820 s – 1990s. Yogyakarta: Benang Merah.
- Sutrisno, D. 2003. "The Assessment Of Rapid Landuse Change and Its Impact on Sustainable Fisheries". *Proceeding of The Open Meeting of Global Environmental Change Research Community*. Montreal, Canada, 16 – 18 October 2003.
- Thohir, M. 2007. Memahami Kebudayaan Teori, Metodologi dan Aplikasi. Fasindo Press. Semarang. 319 hlm
- Thohir, M. 2002. "Penelitian Sosial Budaya dari Memahami ke Melakukan dan Menuliskan". Semarang: Universitas Diponegoro.